

KADISDIK KOTA BATAM DIPANGGIL OMBUDSMAN RI TERKAIT PPDB DI BATAM

Jum'at, 31 Mei 2019 - Agung Setio Apriyanto

"Saya rasa sistem PPDB tahun ini damai-damai saja. Tak ada yang di khawatirkan dan berjalan dengan kondusif tak ada masalah," ujarnya saat ditanyai oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau.

Bahkan dirinya juga tampak tegas menjawab setiap pertanyaan yang hanturkan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari.

"Soal Jumlah siswa perkelas kita tetap komit 36. Kalau tidak diterima disekolah negeri mudah-mudahan orangtua bisa memahami. Sekolah swasta merupakan sekolah pilihan. Sekolah swasta merupakan mitra pemerintah," tutur Hendri, Jumat (31/05/2019).

Diakuinya apabila orangtua memahami investasi pendidikan ia selalu menyarankan tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Masukan Ombudsman, menurutnya, pihaknya harus komitmen dengan ketentuan yang sudah ditentukan.

"Kita akan melaksanakan itu dan apabila hasil sudah keluar nanti kita akan melaporkan kepada walikota batam. Dan walikota batam yang akan memberikan keputusan," tegasnya.

Hendri menambahkan sistem zonasi ini keinginan pemerintah agar anak-anak bersekolah dekat rumah. Zonasi yang dibuat oleh Disdik sudah cukup luas cakupannya.

"Hal ini sampai sekarang masih menjadi evaluasi kita juga semoga kedepan pembangunan sekolah bisa lebih lancar di Batam," tuturnya.